

# RENCANA STRATEGIS

## **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2016 - 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, setiap Pemerintah Daerah harus membuat RPJM Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka dengan ini Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah disusun.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu tugas-tugas kami sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan mudah-mudahan dapat terwujudnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang sejahtera dan bermartabat.

Benteng, April 2018

**KEPALA BPBD,**

**dr. Hj. SARIBULAN ARIFIN**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19590818 198803 2 007

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
BAB I	Pendahuluan :
1.1.	Latar Belakang ..... 1
1.2.	Landasan Hukum ..... 2
1.3.	Maksud dan Tujuan ..... 3
1.4.	Sistematika Penulisan ..... 4
BAB II	Gambaran Pelayanan :
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktural Organisasi ..... 6
2.2.	Sumberdaya ..... 19
2.3.	Kinerja Pelayanan ..... 23
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ..... 26
BAB III	Isu-Isu Strategis :
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan ..... 27
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ..... 28
3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra ..... 29
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... 29
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis ..... 30
BAB IV	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan :
4.1.	Visi dan Misi ..... 31
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ..... 31
4.3.	Strategis dan Kebijakan ..... 40
BAB V	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif ..... 41
BAB VI	Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ..... 55
BAB VII	Penutup ..... 58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Seiring dengan estafet kepemimpinan Bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 17 Februari 2016, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 ( lima ) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional . ( *Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang " Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 "* )..

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021, maka secara sinergi pula Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 2016 - 2021. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RenstraSKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 – 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  12. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Seksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
  15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berta Daerah Kabupaten Kepulauan selayar Tahun 2016);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah KKS Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KKS Tahun 2016-2021

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua jajaran dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di Bidang Penanggulangan Bencana, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya penanggulangan bencana alam.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Merencanakan cara pengendalian Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan Penanggulangan Bencana;
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi Penanggulangan Bencana pada masa depan;
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan;
6. Meningkatkan hubungan yang harmonis antar instansi pada saat terjadi Bencana.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN,** memuat penjelasan umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, referensi berbagai produk peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang pembentukan daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah,

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,** memuat penjelasan umum tentang dasar dasar hukum pembentukan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, kepegawaian serta penjelasan tentang aset yang dikelola dalam rangka pemberian pelayanan mencakup aset, jenis dan kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,** memuat penjelasan tentang identifikasi permasalahan, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi/pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, telaan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, telaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan sasaran Renstra K/L, telaan Rencana Tata Ruang Wilayah, penentuan isu-isu strategis dalam pencapaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,** dalam Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja yang disajikan dalam bentuk tabel.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,** Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
- BAB VI PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,** Memuat tabulasi program dan kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran indikatif program dan kegiatan yang direncanakan, dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Program dan Kegiatan yang melekat pada SKPD dan Program dan Kegiatan dalam kelompok urusan wajib yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan dan Penata Ruang.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG**

**URUSAN**  
**BAB VIII    PENUTUP**  
**LAMPIRAN**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 73 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 dengan tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, meliputi :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pencegahan, dan
  - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
  - 1. Seksi Kedaruratan, dan
  - 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :
  - 1. Seksi Rehabilitasi, dan
  - 2. Seksi Rekonstruksi
- f. Jabatan Fungsional.
  - 1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. dalam

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Pelaksanaan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Badan;
  - e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. Menyelenggarakan perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - g. Menyelenggarakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
  - h. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan bencana daerah;
  - i. Menyelenggaraan pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
  - j. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
  - k. Mengoordinasikan dan menyusun program serta pengelolaan dan penyajian data;
  - l. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  - m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
2. Sekretaris dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;

- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
  - e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. Melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Badan dan semua bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - g. Melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan, dan kepustakaan;
  - h. Melaksanakan, memfasilitasi dan mengoordinasi penyusunan program/kegiatan bidang penanggulangan bencana daerah;
  - i. Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan bidang penanggulangan bencana daerah;
  - j. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana daerah;
  - k. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - l. Melaksanakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan; dan
  - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan penghapusan barang, urusan rumah tangga, serta mengelola administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan bidang penanggulangan bencana daerah;
  - g. Melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - h. Melakukan pembinaan Sumber Daya Manusiadan aparatur;
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.
4. Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi hukum.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian hukum, Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas ;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- g. Melakukan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- h. Melakukan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan kegiatan sosialisasi di bidang penanggulangan bencana daerah;
- j. Melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- k. Melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- l. Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang-bidang penanggulangan bencana daerah;

- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi , memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. Menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - g. Menyiapkan konsep, menyusun dan mengelola anggaran;
  - h. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban dan neraca keuangan;
  - i. Melakukan koordinasi terkait dengan tugas kebendaharaan;
  - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
  - e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. Merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
  - g. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
  - h. Melaksanakan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan.

Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pencegahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Membuat rencana induk dan rencana daerah dalam rangka pembangunan daerah pemukiman akibat bencana;
- g. Membuat rencana pengembangan wilayah yang berkenaan dengan penanggulangan bencana;
- h. Membuat Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkenaan dengan penanggulangan bencana;
- i. Membuat rencana induk dan rencana detail pembangunan fasilitas sarana dalam rangka penanggulangan bencana;

- j. Membuat peta rawan bencana dan penyebarannya kepada masyarakat;
  - k. Menyiapkan data potensi penanggulangan bencana yang dapat digunakan;
  - l. Menyediakan data wilayah yang dapat digunakan dalam sistem Informasi Penanggulangan Bencana Indonesia;
  - m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi pencegahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesiapsiagaan.

Uraian tugas Kepala Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
  - e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. Melakukan pelatihan staf dan satuan melalui uji coba gladi tentang rencana kontijensi bencana;
  - g. Memberikan petunjuk tentang tugas yang akan dilaksanakan dalam Penanggulangan Bencana sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing;
  - h. Menyiapkan fasilitas dan spesifikasi keahlian tim reaksi cepat maupun satgas penanggulangan bencana;
  - i. Menyiapkan pos-pos komunikasi di daerah rawan bencana termasuk fasilitas komunikasi;
  - j. Menyebarkan informasi tentang bencana yang mungkin timbul dengan segala akibat sebagai persiapan penyelamatan atau pengungsian;
  - k. Menyiapkan dan memeriksa tanda-tanda bahaya yang berlaku guna peringatan dini bagi masyarakat untuk mengetahui bencana yang terjadi;
  - l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala seksi kesiapsiagaan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Bidang Kedaruratan dan Logistik Dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai tugas membantu Kepala

Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- g. menyiapkan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan logistik terhadap penanggulangan bencana;
- h. melaksanakan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang kedaruratan dan logistik dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Seksi Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan.

Uraian tugas Kepala Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi kedaruratan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi kedaruratan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Memberi pertolongan terhadap korban di lokasi bencana;

- g. Mengevakuasi korban ke daerah aman;
- h. Mengoordinasikan lokasi daerah aman dan memberi tindakan lebih lanjut;
- i. Mengoordinasikan evakuasi medik, pengobatan darurat dan lanjutan ke rumah sakit menjamin kesehatan dan gizi para pengungsi;
- j. Mengoordinasikan perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi, perhubungan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas mandi, cuci dan kakus;
- k. Melakukan perhitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana;
- l. Memberikan bantuan atau tindakan penanggulangan bencana;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala seksi kedaruratan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Logistik dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang kedaruratan dan logistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang logistik.

Uraian tugas kepala seksi logistik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi logistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengadaan logistik;
- g. Menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan logistik;
- h. Melakukan pemeliharaan dan bantuan logistik ketika terjadi bencana;
- i. Melakukan pelaporan bantuan baik penerimaan maupun penyaluran logistik ketika terjadi bencana;
- j. Melakukan administrasi pertanggungjawaban bantuan bencana;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala seksi logistik dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam

mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Seksi rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi.

Uraian tugas kepala seksi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi rehabilitasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;

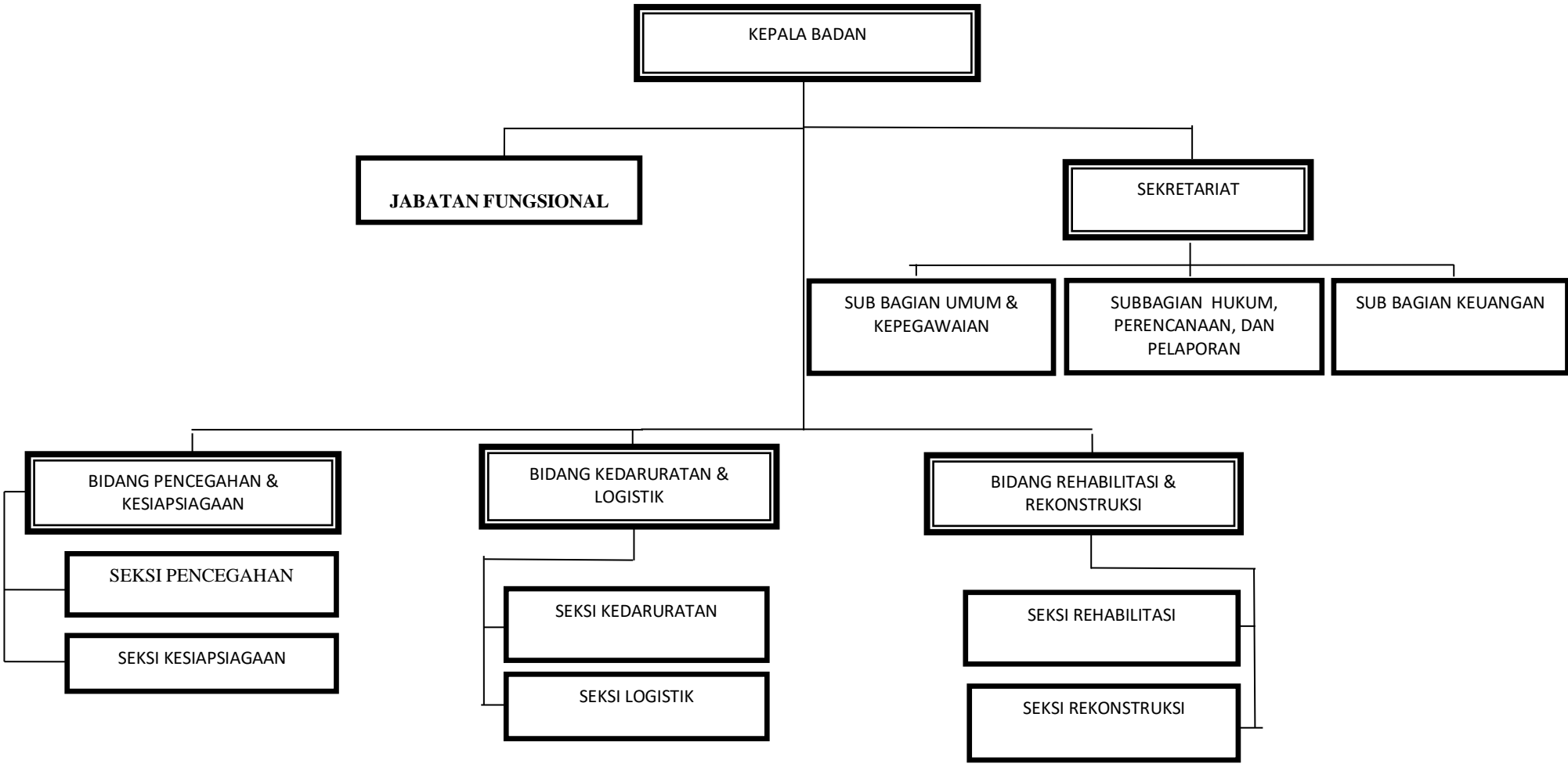
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Menganalisa secara menyeluruh dan mengevaluasi akibat bencana;
- g. Merehabilitasi fisik terbatas akibat bencana;
- h. Merehabilitasi korban baik fisik maupun mental akibat bencana;
- i. Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan rehabilitasi ketika terjadi bencana;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala seksi rehabilitasi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketahanan.

Uraian tugas Kepala Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengavaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan kegiatan yang berkenaan dengan ketahanan terhadap gempa;
- g. Menyiapkan fasilitasi terhadap penanggulangan bencana;
- h. Memberikan saran serta laporan terhadap penanggulangan bencana;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala seksi rekonstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



## 2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

1. Potensi Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

No.	Pangkat / Gol.	Jumlah	Pendidikan	Keterangan
1.	Pembina Utama Muda	1 orang	S1	Kepala Badan
2.	Pembina	2 Orang	S1/S2	Kepala Bidang
3.	Penata TK. I	5 orang	S1	Sekretaris,Kepala Bidang Kepala
4.	Penata	3 orang	SLTA/S 1	Seksi dan
5.				Kasubag.
7.	Penata Muda TK. I	4 orang	SLTA/S 1	KepalaBidang,
8.	Penata Muda	2 orang	S1	Kepala
9.	Pengatur	3 orang	SLTA dan D2	Seksi,Kasubag
10.	Pengatur Muda Tk. I	2 orang	S1 dan SLTA	Kepala Seksi,Staf
11.	Pengatur Muda	1 orang	SLTA	Staf
12.	Juru	1 orang	SLTP	Staf
13	-	37 Orang	SLTA dan S1	Pegawai Kontrak
	<b>Jumlah</b>	<b>60 orang</b>		

Tabel di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan / skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks.

## 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2  
*Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan*

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV	7 Orang
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	2 Orang
3	SPAMEN/DIKLATPIM TK. II	-
JUMLAH		9 Orang

## 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 3  
*Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan*

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	3 Orang
2	III	14 Orang
3	II	5 Orang
4	I	1 Orang
Jumlah		23 Orang

## 4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 4  
*Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf*

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	9 Orang
4	Fungsional	-
5	Staf	46 Orang
Jumlah		60 Orang

## 5. Relawan Bencana

Tabel 5

### *Jumlah Relawan Bencana*

No.	Uraian	Jumlah
1	Tim SAR	Orang
2	TRC PB	24 Orang
3	Relawan Bencana (RB)	Orang
Jumlah		24 Orang

## 6. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Tabel 6

### *Kendaraan Operasional*

No.	Uraian	Jumlah
1	Kendaraan Operasional PMK	5 Unit
2	Mobil Dapur Lapangan Izusu NKR BNPB	1 Unit
3	Mobil Rescue Ford RDC STD	1Unit
4	Speed Boat	3 Unit
5	Kapal Laut Bermotor BPBD	1 Unit
6	Motor Lapangan Trail Kawasaki LX	4 Unit
7	Motor Dinas Lainnya	15 Unit
8	Perahu Dolphin	1 Unit
Jumlah		31Unit

## 7. Peralatan Kebencanaan

Tabel 7

### *Peralatan Kebencanaan*

No.	Uraian	Jumlah
1	Tenda Pengungsi	4 Peti
2	Tenda Dome/Tenda Keluarga	5 Buah
3	Multi Purpose Solar Cell	13 Buah
4	Baju Pelampung	233 Buah
5	Pesawat Telepon Rig2 M Band	1 Buah
6	Tandu	2 Buah

7	Vellbad	160 Buah
8	Kantong Mayat	10 Lembar
9	Selimut	20 lembar
10	Field Bad BNPB	10 Buah
11	Tangga Aluminium/Katrol	4 Buah
12	Tenda Peleton	2 Buah
13	Tabung Pemadam Indoka	10 Buah
14	Tenda Posko	1 Buah
15	Tenda Regu	3 Buah
16	Tenda Keluarga BNPB	4 Buah
17	BNPB Water Treatment	1 Unit
18	Baju Anti Api/Foil	1 Buah
19	Chain Saw	2 Buah
20	Garmin GPS	1 Buah
21	Sargon Alas Tenda	6 Lembar
22	Hoda Generation Set	1 Buah
23	Senter Hid Searchlight	1 Buah
24	RIG Pesawat Radio	1 Buah
25	Handy Talky Icom	4 Buah
26	HT ALINCO	15 Buah
27	Faximili Panasonic	1 Buah
28	Light Lamp Senter Kepala	20 Buah
29	Toa Mega Phone	1 Buah
30	Helm Standar	75 Buah
31	Sony Handycam	1 Buah
32	Camera Digital	2 Buah
33	Mesin Kapal Djiangdong JD 300	2 Buah
34	Peralatan Deteksi Gempa	1 Unit

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam usianya yang masih tergolong sangat muda yang penuh dengan keterbatasan – keterbatasan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sangat membutuhkan dukungan yang lebih serius baik dukungan materil maupun dukungan finansial dari Pemerintah Daerah maupun pihak – pihak lainnya. Hal ini mengingat bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu

kabupaten yang berada di Propinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari gugusan kepulauan yang sangat rentan terhadap kejadian bencana alam. Hal ini sangat diperlukan dalam usaha lebih memaksimalkan pelayanan dibidang Kebencanaan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Tabel 2.1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar**

No .	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Cakupan Penanganan Bencana			95 %	95%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100 %	104%	105%	100%	100%	100%
2.	Cakupan Perlindungan Daerah atas Potensi Kejadian Bencana			95 %	20%	30%	60%	85%	100%	20%	30%	60%	85%	100%	21%	150%	200%	142%	118%
3.	Cakupan Penanganan Lingkungan Pasca Bencana			50 %	20%	30%	60%	85%	100%	20%	30%	60%	85%	100%	40%	150%	200%	142%	118%
4.	Tingkat Kesiapsiagaan Bencana			75 %	20%	30%	60%	85%	100%	20%	30%	60%	85%	100%	27%	150%	200%	142%	118%
5.	Tingkat Kerusakan Akibat Dampak Bencana			75%	20%	30%	60%	85%	100%	20%	30%	60%	85%	100%	27%	150%	200%	142%	118%
6.	Daerah Rawan Bencana			30 %	20%	30%	60%	85%	100%	20%	30%	60%	85%	100%	67%	150%	200%	142%	118%

Tabel 2.2

**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -					Rata – rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Operasional Penanggulangan Korban Bencana Alam	-	Rp. 185.000.000,-	Rp. 150.000.000,-	Rp. 160.000.000,-	Rp. 115.300.400,-	-	Rp. 184.695.980,-	Rp. 149.940.600,-	Rp. 159.482.060,-	Rp. 114.276.600,-		100 %	100 %	100 %	99 %	-	-
Sosialisasi Penanggulangan Bencana		-	-	Rp. 135.000.000,-	Rp. 5.379.200,-	-	-	-	Rp. 134.729.000,-	Rp. 5.379.200,-				100 %	100 %		
Pengadaan Sarana Mobilitas Air/Laut ( Bantuan Provinsi )		-	-	Rp. 33.000.000,-	-	-	-	-	Rp. 33.000.000,-	-				100 %			

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi tantangan sebagai berikut :

- a. Semakin meningkatnya tuntutan dan kritisnya masyarakat terhadap peningkatan pelayanan pemerintah.
- b. Sebagian besar wilayah yang berpotensi terjadi bencana
- c. Upaya Mitigasi Bencana yang belum memadai
- d. Pemanfaatan lahan yang berlebihan dan belum terencana dengan baik
- e. Belum adanya masterplant penanggulangan bencana yang menyeluruh
- f. Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian serta keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana

Disamping tantangan yang dihadapi terdapat pula peluang sebagai berikut :

- a. Adanya sistem regulasi yang memadai yang menjadi dasar hukum untuk mendukung kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan canggih yang dapat mendukung peningkatan kualitas penanganan bencana
- c. Adanya tren peningkatan alokasi anggaran setiap tahun baik itu bersumber dari APBD, APBN (DAK) maupun anggaran dari BNPB
- d. Pelatihan SDM Untuk Peningkatan Keterampilan

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

##### **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan BPBD sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Seksi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu:

1. Terbatasnya sumber daya aparatur bidang penanggulangan bencana, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat dalam mendukung pelaksanaan tugas
3. Masih lemahnya sistim pendataan/informasi
4. Alokasi anggaran yang belum memadai dalam rangka Penanggulangan Bencana
5. Belum Optimalnya koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor Internal :
  1. Keterbatasan sumber daya aparatur penanggulangan bencana
  2. Jumlah aparatur belum mencukupi
  3. Sarana dan prasarana belum memadai
- 2) Faktor Eksternal :
  - 3) Kurangnya alokasi anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana
  - 4) Belum maksimalnya koordinasi lintas sektoral
  - 5) Belum maksimalnya kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang serta dengan memperhitungkan faktor-faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta stakeholder lainnya, maka dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021 dicanangkan Visi Kabupaten Kepulauan Selayar **“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”**, dengan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi Dan Basis Nilai Utama Dalam Pembangunan Secara Terencana, Menyeluruh dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan.
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat.
4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata
5. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah
6. Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan
7. Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan.

Dalam rangka mendukung/menyukseskan Visi/Misi Bupati tersebut khususnya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, dituangkan dalam program kegiatan lima tahun ke depan, namun demikian pelaksanaannya masih terkendala pada:

1. Keterbatasan SDM Aparatur (baik dari segi kualitas maupun kuantitas)
2. Keterbatasan dari segi anggaran

3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penanganan kebencanaan.
4. Keterbatasan SDM Masyarakat dalam hal penanganan kebencanaan.

### **3.3. Telaahan Renstra Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

Rencana Startegi lima tahun kedepan BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka upaya menghilangkan atau mengurangi risiko bencana dan membangun masyarakat yang tanggap dan tangguh menghadapi ancaman bencana menitikberatkan kepada koordinasi antar sektor dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana secara bersinergis. Oleh karena itu tersedianya perangkat kebijakan operasional, adanya koordinasi antar sektor, adanya kebersamaan antar pemerintah dan masyarakat yang bersinergis serta tingginya partisipasi masyarakat merupakan kondisi yang diinginkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bentuk Telaahan dan keterkaitan antara Renstra BPBD Kota Makassar yaitu Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provnsi Sulawesi Selatan.

#### **a. Visi dan Misi BNPB**

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Adapun Visi BNPB yaitu : **“Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana”**

sedangkan Misi yaitu :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko,
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal,
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh

#### **b. Visi dan Misi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan**

**Visi : “Ketangguhan Sulawesi Selatan dalam Penanggulangan Bencana Untuk Mendukung Akselerasi Kesejahteraan 2018”**

Misi:

1. Memperkuat Sistem Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan.
2. Memperkuat Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan

Tujuan yang ditetapkan untuk periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana pada tahap pra, saat dan paska bencana secara terpadu dan menyeluruh.
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan BPBD Sulawesi Selatan untuk menjalankan Tupoksi secara maksimal.

Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai 2018, sebagai berikut :

1. Tersedianya perangkat regulasi, perencanaan, mekanisme dan SDM dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana
2. Tersedianya perangkat regulasi, perencanaan, mekanisme dan SDM yang kuat dalam pelaksanaan bidang Kedaruratan & Logistik
3. Tersedianya perangkat regulasi, perencanaan, mekanisme dan SDM yang kuat dalam pelaksanaan bidang RR
4. Meningkatnya kualitas dan akses Data dan Informasi serta pelaksanaan Humas Penanggulangan Bencana di Sulsel
5. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang tupoksi BPBD
6. Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kinerja BPBD Sulsel
7. Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja BPBD Sulsel

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi yang ditetapkan dalam RENSTRA BPBD Tahun 2013-2018, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat regulasi daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan dalam mendukung PB
3. Meningkatkan kerjasama/kemitraan dengan para pemangku kepentingan terkait PB.
4. Meningkatkan pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas Personil BPBD dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya.
6. Meningkatkan sarana prasarana dalam mendukung PB M
7. Meningkatkan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja BPBD Sulsel

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dengan mempertimbangan kondisi internal dan eksternal Renstra BPBD Kota Makassar 2014-2019

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka kebijakan penanggulangan bencana dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menetapkan regulasi daerah yang mendukung penyelenggaraan PB di daerah.
- b. Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pelayanan kebencanaan
- c. Mendorong kerjasama lebih aktif dengan parapihak dalam bentuk kerjasama Program.
- d. Mendukung BPBD Kabupaten/kota dalam fasilitasi pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat.
- e. Menetapkan standar operasional prosedur pengelolaan PUSDALOPS PB.
- f. Menetapkan sistem rekrutmen (kualifikasi dan penempatan personil) sesuai kompetensi.
- g. Peningkatan alokasi anggaran PB dalam APBD dan APBN
- h. Menetapkan tata kelola perencanaan dan evaluasi kinerja BPBD Sulsel

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km<sup>2</sup>, terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut adalah 9.146,66 km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai yaitu 670 km.

Sebagai Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara geografis terletak di ujung selatan Jazirah Sulawesi dan memanjang dari utara ke Selatan dan terdiri dari gugusan pulau-pulau (132 pulau), Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi terhadap bencana alam berupa tsunami, kecelakaan laut, angin kencang, abrasi pantai dan banjir. Hampir semua Desa dan Kelurahan sepanjang pantai barat dan timur serta 26 pulau berpenghuni pada 5 (lima) kecamatan yang berada di kepulauan, rawan terhadap bencana alam laut.

Kawasan yang potensial dilanda gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsor, dengan ketentuan umum kegiatan tersebut.

Dapat dilakukan pembangunan umum dan infrastruktur yang dibutuhkan dengan ketentuan teknis yang ramah gelombang pasang dilengkapi bangunan/tanaman penahan tsunami, jalan dan bangunan penyelamat.

Ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang menuntut adanya penyelenggaraan Penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal ini untuk mencegah dampak dari pemanfaatan ruang yang tidak tepat pada daerah tertentu misalnya pemanfaatan kawasan longsor, pembangunan di daerah penyanggah/buffer zone (sempadan sungai, hutan bakau, dll). Dampak Pemanfaatan Ruang yang tidak Tepat antara lain berakibat pada hilangnya fungsi lindung hidrolis kawasan, menurunnya kemampuan peresapan air, ancaman banjir terhadap bangunan di bantaran sungai, hilangnya daerah buffer/penyanggah, dll.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Isu – isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diurai sebagai berikut :

- a. Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim.

- b. Mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga – lembaga non Pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non pemerintah dan masyarakat, serta pembentukan desa tangguh bencana, relawan bencana dan kemas bencana.
- c. Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan darurat dan koordinasi dengan bidang logistik dan peralatan.
- d. Belum optimalnya pengalokasian anggaran dana siap pakai (on call) sesuai dengan tugas dan fungsi bidang penanganan darurat.
- e. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- f. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana melalui pendidikan formal dan non-formal (pelatihan dan kursus)
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021. Karakteristik tujuan adalah sebagai berikut :

- Idealistik : Mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
- Jangkauan ke depan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi.
- Abstrak : Belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan tujuan sebagai berikut :

**“Mewujudkan Perlindungan Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan Bencana”.**

##### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu setahun. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumberdaya yang mengarah pada hasil nyata. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Menciptakan profesionalisme aparatur dalam penanggulangan bencana.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan kebencanaan
4. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur penanggulangan bencana
5. Memulihkan keberdayaan ekonomi, infrastruktur dan fasilitas umum masyarakat korban bencana

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNYA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	8		10	12	14	16	18
1	<b>Memperkuat Struktur Budaya Organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (T2)</b>	Meningkatnya kualitas pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel (S2)	Opini Laporan Keuangan	Disclaimer	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pemerintah daerah yang efektif dan efisien (S3)	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	C	CC	B	BB	BB	BB	BB
			Skor Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

3	<b>Memelihara Fungsi Lingkungan Hidup (T14)</b>	Terpeliharanya kelestarian hidup sumberdaya alam (S24)	Indeks Lingkungan hidup	78,08	78,1	78,3	78,7	78,9	79	79,05

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dikolaborasi ke dalam upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan BPBD yang akan dilaksanakan hingga tahun 2021. Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021. Untuk mencapai tujuan dari misi kelima yaitu Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah.

Adapun Rumusan Strategi dan Kebijakan disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi “Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”			
MISI 2 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif, dan transparan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Memperkuat Struktur Budaya Organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</b>	Meningkatnya kualitas pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya kemampuan dan kualitas pengelolaan dan aset daerah	Mengoptimalkan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan daerah
			Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta pencegahan

			terjadinya potensi kebocoran anggaran
			Peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah
			Peningkatan kualitas manajemen aset daerah
	Meningkatnya kualitas pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sektor	Penguatan kelembagaan pemerintah daerah
			Peningkatan kinerja penyelenggaraan program pembangunan daerah
MISI 5 “Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keuanggulan komparatif dan kompetitif daerah”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Memelihara Fungsi Lingkungan Hidup</b>	1. Memelihara kelestarian sumberdaya alam	1. Melaksanakan pembangunan sesuai daya tampung lingkungan hidup	1. Pelaksanakan pembangunan kawasan dan atau wilayah berdasarkan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak

			Lingkungan (AMDAL)
--	--	--	-----------------------

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program Strategis dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Program adalah upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Program tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kegiatan operasional. Kegiatan tersebut merupakan penjabaran kebijakan yang telah dibuat, sebagai arah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program strategis tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021 adalah sbb :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pwerundang-Undangan
  - c. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
  - d. Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran
2. Tunjangan Resiko Kerja Personil Kebencanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - d. Pengadaan Meubeleur
  - e. Pengadaan finger Print
  - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- j. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
  - b. Pengembangan Wawasan SDM Aparatur dan Masyarakat Pengelola Penanggulangan Bencana
  - c. Pelatihan Penyelamatan Evakuasi di Laut
- 4. Peningkatan Disiplin Aparatur
  - a. Pengadaan Pakaian Kerja dan Atribut PNS
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
  - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
  - d. Penyusunan Lakip
  - e. Penyusunan Renja SKPD
  - f. Pelaksanaan Tim Tindak Lanjut SKPD
  - g. Penatausahaan Barang dan Persediaan SKPD
  - h. Inventarisasi Aset dan Kodefikasi Barang SKPD
  - i. Penyusunan RKA/DPA Pokok
  - j. Penyusunan Renstra SKPD
  - k. Penyusunan Administrasi Keuangan dan Pertanggungjawaban
  - l. Standar Pelayanan SPM
- 6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
  - a. Pendampingan Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana
  - b. Penyusunan Inventarisasi Peralatan dan Logistik Bencana
  - c. Penguatan Kelembagaan Posko Bencana di Tingkat Kecamatan
  - d. Pengadaan Pelampung
- 7. Penanganan Terpadu Korban Kapal Tenggelam
  - a. Pemberian Bantuan Kepada Korban Kapal Tenggelam

8. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam
  - a. Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
  - b. Pelatihan Relawan Bencana
  - c. Penyusunan Peta Rawan Bencana Wilayah Kecamatan Kepulauan
  - d. Pembuatan Rambu Jalur Evakuasi
  - e. Pembuatan Data Penanggulangan Bencana
  - f. Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana
9. Program Pengawasan dan Pengendalian Program
  - a. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program Kegiatan Kebencanaan
10. Program Rehabilitasi Pada Tahapan Pasca Bencana
  - a. Peninjauan dan Assesment Kerusakan dan Kerugian Masyarakat Pasca Bencana
  - b. Rehabilitasi Terbatas Rumah Korban yang Rusak Ringan Akibat Bencana
  - c. Pembangunan Tanggul/Bronjong
  - d. Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
  - e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
  - f. Workshop DALA dan HRNA Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  - g. Pendampingan Dana Hibah
  - h. Rehabilitasi Dan Reonstruksi Pasca Bencana
11. Program Penanganan Korban Darurat Bencana
  - a. Penyediaan Dana Sipa Pakai Bagi Korban Bencana
  - b. Pengkajian dan Pendataan Peristiwa Bencana
  - c. Pengadaan Logistik Untuk Korban Bencana
  - d. Pengadaan Mobil Logistik
  - e. Penguatan dan Pemberdayaan Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS)
  - f. Pemberdayaan TRC (Tim Reaksi Cepat)

- g. Pemberian Santunan Bagi Korban Bencana yang Cacat dan Meninggal Dunia.

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020					
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Memperkuat Struktur Budaya Organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi															
				Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dapat Dipenuhi	14 Layanan	14 Layanan	898.155.000	14 Layanan	803.030.000	14 Layanan	958.640.000	14 Layanan	1.824.956.310,19	14 Layanan	2.413.659.312,86	14 Layanan	2.413.659.312,86	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Persediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bln	12 Bln	50.000.000	12 Bulan	66.500.000	3 unit Layanan	65.000.000	3 unit Layanan	78.650.000	3 unit Layanan	78.650.000	3 unit Layanan	78.650.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 Tabloid	10 Tabloid	10.000.000	10 Tabloid	20.000.000	10 Tabloid	15.000.000	10 Tabloid	80.000.000	10 Tabloid	80.000.000	10 Tabloid	80.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang Dilaksanakan	500 kali	500 kali	380.000.000	1 Tahun	455.000.000	150 Kegiatan	267.810.000	150 Kegiatan	1.165.001.870,18	150 Kegiatan	1.753.704.872,85	150 Kegiatan	1.753.704.872,85	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Tunjangan Resiko Kerja Personil Kebencanaan	Tersedianya Dana Tunjangan Resiko Kerja Personil Kebencanaan														BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
2	<b>Memperkuat Struktur Budaya Organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel		<b>Program Pengawasan dan Pengendalian Program</b>	<b>Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Program</b>															
				Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program Kegiatan Kebencanaan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Kegiatan Kebencanaan yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	62.500.000			12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	150.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar

3	Memperkuat Struktur Budaya Organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	27.500.000	1 Unit	27.500.000	1 Unit	27.500.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	205.000.000	21 Unit	181.900.000	10 Unit	105.200.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang dilaksanakan	1 Unit	1 Unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang	16 Unit	16 Unit	12.500.000	30 Unit	12.500.000	16 Unit	12.500.000	16 Unit	16.000.000	16 Unit	16.000.000	16 Unit	16.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 unit	1 unit	200.000.000											BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang	4 Unit	4 Unit	31.500.000	4 Unit	45.470.000									BPBD	Kab. Kepulauan Selayar

					dapat disediakan														
				Pengadaan Meubeleur	Jumlah Mobiler yang tersedia	40 Unit	40 Unit	35.000.000	11 Unit	20.000.000								BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit	3 unit	54.000.000	1 Unit	20.000.000								BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	121 Unit	121 Unit	165.000.000	2 Unit	15.000.000								BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Finger Print	Persentase kehadiran pegawai tepat waktu													BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pembuatan Website OPD	Jumlah Website yang Tersedia					1 Website	10.000.000	1 Website	12.500.000	1 Website	12.500.000	1 Website	12.500.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
4	Memperkuat Struktur Budaya Organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Sumberdaya Aparatur yang Difasilitasi														

				Pengembangan Wawasan SDM Aparatur dan Masyarakat Pengelola Penanggulangan Bencana	Jumlah aparatur dan masyarakat yang terlatih	200 Orang	200 Orang	140.000.000	200 Orang	125.000.000									BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 Orang	12 Orang	110.000.000	14 Orang	150.000.000	9 Orang	75.000.000	15 Orang	82.500.000	15 Orang	82.500.000	15 Orang	82.500.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengelolaan Penanggulangan Bencana Pelatihan Penyelamatan dan Evakuasi di Laut	Jumlah Pegawai yang terlatih				25 Orang	40.000.000									BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
5	<b>Memperkuat Struktur Budaya Organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien		<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Kehadiran Pegawai Tepat Waktu</b>															
				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Jenis Pakaian Kerja yang tersedia				50 Pasang	25.000.000	55 Pasang	27.500.000	60 Pasang	30.000.000	60 Pasang	30.000.000	60 Pasang	30.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar

				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Jenis Pakaian Kerja yang tersedia				104 Meter	15.600.000									BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
6	Memperkuat Struktur Budaya Organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien		Peningkatan Penembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja yang tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	10.000.000									BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	27.500.000	1 Dokumen	27.500.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	8.250.000	1 Dokumen	8.250.000	1 Dokumen	8.250.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Rencana Kinerja SKPD yang sesuai dengan Renstra dan RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	8.250.000	1 Dokumen	8.250.000	1 Dokumen	8.250.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar

				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Kauangan Semesteran sesuai dengan regulasi	1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000	1 Doku men	17.500.00 0									BPBD	Kab. Kepula uan Selayar
				Penyusunan RENSTRA SKPD	Persentase Peningkatan Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000											BPBD	Kab. Kepula uan Selayar
				Penyusunan Administrasi Keuangan dan Pertanggung gjawaban	Jumlah Penatausaha an Keuangan dan perbendahara an yang sesuai regulasi	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Doku men	25.000.00 0									BPBD	Kab. Kepula uan Selayar
				Pelaksanaa n Tim Tindak Lanjut SKPD	Jumlah Tindak Lanjut SKPD hasil pemeriksaan yang difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Doku men	7.500.000									BPBD	Kab. Kepula uan Selayar
				Penatausah aan Barang dan Persediaan SKPD	Jumlah Kartu Inventaris Barang dan Persediaan SKPD yang tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	17.500.000	12 Doku men	15.000.00 0			12 Dokumen	17.500.000	12 Dokumen	17.500.000	12 Dokume n	17.500.000	BPBD	Kab. Kepula uan Selayar
				Inventarisasi Asset dan Kodefikasi Barang SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset dan Kodefikasi Barang SKPD yang tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000											BPBD	Kab. Kepula uan Selayar
				Penyusunan RKA/DPA Pokok	Jumlah Dokumen RKA/DPA yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Doku men	20.000.00 0	1 Dokum en	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokume n	7.500.000	BPBD	Kab. Kepula uan Selayar

				Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan yang dibuat														BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengelolaan Aset SKPD	Laporan Aset SKPD			4 Dokumen	20.000.000			4 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	40.000.000	40.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
7.	Memelihara Fungsi Lingkungan Hidup	Memelihara kelestarian sumberdaya alam		Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam	Peningkatan Persentase Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Bencana Alam															
				Pelatihan Relawan Bencana	Jumlah Masyarakat yang terlatih														BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Penyebarluasan Informasi Bencana Alam (Kalender dan Baliho)	Jumlah kalender dan baliho yang didistribusikan kepada masyarakat	650 Kalender	650 Kalender	40.000.000	500 Eksa mplar	33.600.000	600 Kalend er	47.600.000	600 Kalender	50.000.000	600 Kalender	50.000.000	600 Kalende r	50.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Penyusunan Peta Rawan Bencana Wilayah Kecamatan Kepulauan	Jumlah Peta Rawan Bencana Yang Tersedia	25 Lembar	25 Lembar	90.000.000											BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pembuatan Rambu Jalur Evakuasi	Jumlah Rambu Jalur Evakuasi yang terpasang				100 Ramb u	25.000.000	500 Buah	48.500.000	550 Buah	55.000.000	550 Buah	55.000.000	550 Buah	55.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pembuatan Data Potensi Penanggula ngan Bencana	Jumlah Data Potensi yang tersedia				1 Doku men	36.400.000									BPBD	Kab. Kepulauan Selayar

				Pelaksanaa n Apel Siaga Bencana	Persentase Kesiagaan dalam Menghadapi Bencana				1 Kali	25.000.00 0									BPBD	Kab. Kepula uan Selayar	
				Pelaksanaa n Program Desa Tangguh bencana	Jumlah desa yang difasilitasi														BPBD	Kab. Kepula uan Selayar	
				Penguranga n Risiko Bencana Akibat Cuaca Ekstrim	Jumlah Pohon yang Dipangkas dan Dibersihkan/D irapikan					200 Pohon	60.000.00 0	250 Pohon	75.000.000	250 Pohon	75.000.000	250 Pohon	75.000.000		BPBD	Kab. Kepula uan Selayar	
				Edukasi Kebencanaa n di Tingkat Sekolah	Jumlah Siswa yang Terlatih					5 Sekola h	48.500.00 0	10 Sekolah	80.000.000	10 Sekolah	80.000.000	10 Sekolah	80.000.000		BPBD	Kab. Kepula uan Selayar	
				Koordinasi dan Konsultasi Penguranga n Risiko Bencana	Pengurangan Resiko Bencana Bagi Masyarakat					2 Kali	75.000.00 0	4 Kali	80.000.000	4 Kali	80.000.000	4 Kali	80.000.000		BPBD	Kab. Kepula uan Selayar	
8	Memeliha ra Fungsi Lingkung an Hidup	Memeli hara kelestar ian sumber daya alam		Program Pencegaha n Dini dan Penanggul angan Bencana Alam	Jumlah Peralatan dan Logistik Bencana yang Tersedia																
				Pendamping an Bantuan Peralatan dan Logistik	Jumlah Bantuan Logistik dan Peralatan yang Diperoleh dari Pemerintah Provinsi dan Pusat	100 Orang	100 Orang	30.000.000	100%	90.000.00 0	1 Dokum en	79.400.00 0	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokume n	80.000.000		BPBD	Kab. Kepula uan Selayar

9	Memelihara Fungsi Lingkungan Hidup	Memelihara kelestarian sumber daya alam		Program Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Korban Darurat Bencana															
				Penyediaan Dana Siap Pakai Bagi Korban bencana	Jumlah Pemberian Bantuan Stimulasi Bagi Korban Bencana	200 Orang	200 Orang	200.000.000	200 Orang	100.000.000	40 KK	129.000.000	40 KK	125.000.000	40 KK	125.000.000	40 KK	125.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengkajian dan Pendataan Peristiwa Bencana	Jumlah Pengkajian dan Pendataan Bencana yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat yang Terlatih	1 Tim	1 Tim	80.000.000	29 Orang	80.000.000	24 Orang	60.400.000	24 Orang	80.000.000	24 Orang	80.000.000	24 Orang	80.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
8	Memelihara Fungsi Lingkungan Hidup	Memelihara kelestarian sumber daya alam		Program Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Kejadian Bencana yang Difasilitasi															
				Peninjauan dan Asesment Kerusakan dan Kerugian Masyarakat Pasca Bencana	Jumlah Kegiatan Asesment yang Difasilitasi	1 Paket	1 Paket	75.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Dokumen	142.800.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar

				Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana	Jumlah Rumah Masyarakat Pasca Bencana yang Diperbaiki					100 KK	295.800.000	200 KK	400.000.000	200 KK	400.000.000	200 KK	400.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar	
				Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Pasca Bencana	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pasca Bencana					10 Kali	75.000.000	10 Kali	80.000.000	10 Kali	80.000.000	10 Kali	80.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar	
				Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan Jenis Material Dasar yang Difasilitasi	200 Rumah	200 Rumah	245.000.000	100 Rumah	225.000.000	2805 Meter	15.000.000.000	2.000 Meter	1.000.000.000	2.000 Meter	1.000.000.000	2.000 Meter	1.000.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pendampingan Pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah		1000 Meter	1000 Meter	50.000.000			1 Dokumen	175.000.000							BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pembangunan Tanggul/Bronjong	Persentase Jumlah Tanggul yang Difasilitasi	100 Meter	100 Meter	200.000.000	200 Meter	440.000.000			250 Meter	500.000.000	250 Meter	500.000.000	250 Meter	500.000.000	BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Pembangunan Tanggul/Bronjong (lanjutan)	Persentase Jumlah Tanggul yang Difasilitasi	1000	1000	111.142.000	68 Meter	9.985.000									BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
				Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Lanjutan)	Cakupan Jenis Material Dasar yang Difasilitasi	1000 Meter	1000 Meter	6.058.251.300											BPBD	Kab. Kepulauan Selayar
JUMLAH								9.840.548.300		3.449.985.000		17.896.150.000		6.651.108.180,37		7.828.514.185,71		7.828.514.185,71		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kepulauan Selayar dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 6.1

## INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Caupan Pelayanan Bencana kebakaran kabupaten	40	40	40	40	40	40	40
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90	90	90	90	90	90	90
3.	Indeks Kepuasan layanan masyarakat	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan manifestasi tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) ini dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Tahunan dengan memperhatikan Target Kinerja yang telah ditetapkan.

Benteng, 10 Januari 2018

**KEPALA BPBD,**

**dr. Hj. SARIBULAN ARIFIN**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP.19590818 198803 2 007

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							2016		2017		2018		2019		2020		Target	Pagu Indikatif
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Memperkuat Struktur Budaya Organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi			1.338.155.000		1.344.530.000		1.306.450.000		3.086.608.180		4.267.364.184		4.267.364.184
				Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dapat Dipenuhi	14 Layanan	14 Layanan	898.155.000	14 Layanan	803.030.000	14 Layanan	958.640.000	14 Layanan	1.824.956.310	14 Layanan	2.413.659.312	14 Layanan	2.413.659.312
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Persediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bln	12 Bln	50.000.000	12 Bulan	66.500.000	3 unit Layanan	65.000.000	3 unit Layanan	78.650.000	3 unit Layanan	80.000.000	3 unit Layanan	80.000.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10 Tabloid	10 Tabloid	10.000.000	10 Tabloid	20.000.000	10 Tabloid	15.000.000	10 Tabloid	18.000.000	10 Tabloid	20.000.000	10 Tabloid	20.000.000
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang Dilaksanakan	500 kali	500 kali	380.000.000	1 Tahun	455.000.000	150 Kegiatan	267.810.000	150 Kegiatan	1.165.001.870	150 Kegiatan	1.753.704.872	150 Kegiatan	1.753.704.872
				Tunjangan Resiko Kerja Personil Kebencanaan	Tersedianya Dana Tunjangan Resiko Kerja Personil Kebencanaan													

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							2016		2017		2018		2019		2020			
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.	Memperkuat Struktur Budaya Organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel		Program Pengawasan dan Pengendalian Program	Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Program			100.000.000		62.500.000				150.000.000		160.000.000		160.000.000
				Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program Kegiatan Kebencanaan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Program Kegiatan Kebencanaan yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	62.500.000				150.000.000	12 Dokumen	160.000.000	12 Dokumen	160.000.000
3.	Memperkuat Struktur Budaya Organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pemerintah daerah yang efektif dan efisien		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			748.000.000		339.870.000		162.700.000		679.000.000		720.750.000		720.750.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	27.500.000	1 Unit	30.250.000	1 Unit	30.250.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	205.000.000	21 Unit	181.900.000	10 Unit	105.200.000	20 Unit	175.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang dilaksanakan	1 Unit	1 Unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang	16 Unit	16 Unit	12.500.000	30 Unit	12.500.000	16 Unit	12.500.000	16 Unit	16.000.000	16 Unit	17.000.000	16 Unit	17.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							2016		2017		2018		2019		2020			
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Seding/Berat Gedung Kantor	1 unit	1 unit	200.000.000										
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dapat disediakan	4 Unit	4 Unit	31.500.000	4 Unit	45.470.000			5 Unit	66.000.000	5 Unit	66.000.000	5 Unit	66.000.000
				Pengadaan Meubleur	Jumlah Mobiler yang tersedia	40 Unit	40 Unit	35.000.000	11 Unit	20.000.000			40 Unit	66.000.000	50 Unit	66.000.000	50 Unit	66.000.000
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit	3 unit	54.000.000	1 Unit	20.000.000			3 Unit	66.000.000	3 Unit	66.000.000	3 Unit	66.000.000
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	121 Unit	121 Unit	165.000.000	2 Unit	15.000.000			100 Unit	200000000	100 Unit	200.500.000	100 Unit	200.500.000
				Pengadaan Finger Print	Persentase kehadiran pegawai tepat waktu													
				Pembuatan Website OPD	Jumlah Website yang Tersedia						1 Website	10.000.000	1 Website	32.500.000	1 Website	35.000.000	1 Website	35.000.000
4.	Memperkuat Struktur Budaya Organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pemerintah daerah yang efektif dan efisien		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Sumberdaya Aparatur yang Difasilitasi			250.000.000		315.000.000		75.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000
				Pengembangan Wawasan SDM Aparatur dan Masyarakat Pengelola Penanggulangan Bencana	Jumlah aparatur dan masyarakat yang terlatih	200 Orang	200 Orang	140.000.000	200 Orang	125.000.000								
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 Orang	12 Orang	110.000.000	14 Orang	150.000.000	9 Orang	75.000.000	15 Orang	150.000.000	20 Orang	200.000.000	20 Orang	200.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							2016		2017		2018		2019		2020			
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Pengelolaan Penanggulangan Bencana Pelatihan Penyelamatan dan Evakuasi di Laut	Jumlah Pegawai yang terlatih				25 Orang	40.000.000								
5.	Memperkuat Struktur Budaya Organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pemerintah daerah yang efektif dan efisien		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai Tepat Waktu				40.600.000		27.500.000		33.275.000		36.602.500		36.602.500	
				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Jenis Pakaian Kerja yang tersedia				50 Pasang	25.000.000	55 Pasang	27.500.000	60 Pasang	33.275.000	60 Pasang	36.602.500	60 Pasang	36.602.500
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Jenis Pakaian Kerja yang tersedia				104 Meter	15.600.000								
6.	Memperkuat Struktur Budaya Organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pemerintah daerah yang efektif dan efisien		Peningkatan Penembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			185.000.000		167.500.000		47.500.000		282.500.000		313.500.000		313.500.000
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja yang tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	10.000.000			1 Dokumen	30000000	1 Dokumen	33.000.000	1 Dokumen	33.000.000
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	44.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							2016		2017		2018		2019		2020			
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Dokumen Profil SKPD								1 Dokumen	17.500.000	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	18.000.000
				Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000	1 Dokumen	16.500.000
				Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Rencana Kinerja SKPD yang sesuai dengan Renstra dan RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	16.500.000	1 Dokumen	16.500.000
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran sesuai dengan regulasi	1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000	1 Dokumen	17.500.000								
				Penyusunan RENSTRA SKPD	Persentase Peningkatan Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000										
				Penyusunan Administrasi Keuangan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Penatausahaan Keuangan dan perbendaharaan yang sesuai regulasi	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	25.000.000								
				Pelaksanaan Tim Tindak Lanjut SKPD	Jumlah Tindak Lanjut SKPD hasil pemeriksaan yang difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	7.500.000			1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	22.000.000
				Penatausahaan Barang dan Persediaan SKPD	Jumlah Kartu Inventaris Barang dan Persediaan SKPD yang tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	17.500.000	12 Dokumen	15.000.000			12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	27.500.000	12 Dokumen	27.500.000
				Inventarisasi Aset dan Kodefikasi Barang SKPD	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset dan Kodefikasi Barang SKPD yang tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000					4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	25.000.000
				Penyusunan RKA/DPA Pokok	Jumlah Dokumen RKA/DPA yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	7.500.000						
				Penyusunan RKA/RKAP, DPA/PDPA	Jumlah Dokumen RKA/RKAP, DPA/PDPA yang tersedia								2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	27.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							2016		2017		2018		2019		2020			
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan yang dibuat								1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	22.000.000
				Pengelolaan Aset SKPD	Laporan Aset SKPD				4 Dokumen	20.000.000			4 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	40.000.000
				Penyusunan Standar Pelayanan SPM	Jumlah Standar Pelayanan SPM sesuai regulasi								2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	22.000.000
7.	Memelihara Fungsi Lingkungan Hidup	Memelihara kelestarian sumberdaya alam		Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam	Peningkatan Persentase Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Bencana Alam			130.000.000		120.000.000		279.600.000		27.107.500.000		29.743.250.000		29.743.250.000
				Pelatihan Relawan Bencana	Jumlah Masyarakat yang terlatih													
				Penyebarluasan Informasi Bencana Alam (Kalender dan Baliho)	Jumlah kalender dan baliho yang didistribusikan kepada masyarakat	650 Kalender	650 Kalender	40.000.000	500 Eksampul	33.600.000	600 Kalender	47.600.000	650 Kalender	75.000.000	650 Kalender	82.500.000	650 Kalender	82.500.000
				Penyusunan Peta Rawan Bencana Wilayah Kecamatan Kepulauan	Jumlah Peta Rawan Bencana Yang Tersedia	25 Lembar	25 Lembar	90.000.000										
				Pembuatan Rambu Jalur Evakuasi	Jumlah Rambu Jalur Evakuasi yang terpasang				100 Rambu	25.000.000	500 Buah	48.500.000	550 Buah	450.000.000	550 Buah	495.000.000	550 Buah	495.000.000
				Pembuatan Data Potensi Penanggulangan n Bencana	Jumlah Data Potensi yang tersedia				1 Dokumen	36.400.000								
				Pelaksanaan Apel Siaga Bencana	Persentase Kesiagaan dalam Menghadapi Bencana				1 Kali	25.000.000								
				Pelaksanaan Program Desa Tangguh bencana	Jumlah desa yang difasilitasi													
				Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah Pohon yang Dipangkas dan Dibersihkan/Dirapikan						200 Pohon	60.000.000	300 Pohon	100.000.000	300 Pohon	110.000.000	300 Pohon	110.000.000
				Edukasi Kebencanaan di Tingkat Sekolah	Jumlah Siswa yang Terlatih						5 Sekolah	48.500.000	10 Sekolah	100.000.000	10 Sekolah	330.000.000	10 Sekolah	130.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							2016		2017		2018		2019		2020		Target	Pagu Indikatif
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Kordinasi dan Konsultasi Pengurangan Risiko Bencana	Pengurangan Risiko Bencana Bagi Masyarakat						2 Kali	75.000.000	4 Kali	82.500.000	4 Kali	90.750.000	4 Kali	90.750.000
				Pengurangan Risiko Bencana Akibat Abrasi Pantai	Penanaman Mangrove/ Tanggul Hijau / Betonisasi								4500 Meter	24.800.000.000	4500 Meter	27.500.000.000	5.000 Meter	27.300.000.000
				Sosialisasi dan Edukasi Kebencanaan di daerah Pesisir	Terpenuhinya Edukasi Kebencanaan di Daerah Pesisir								20 Desa	200.000.000	20 Desa	120.000.000	20 Desa	220.000.000
				Pengurangan Risiko Bencana pada Fasilitas Umum	Rambu dan Jalur Evakuasi di Pasang								1 Paket	750.000.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	750.000.000
				Pencanangan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh								12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	165.000.000
				Edukasi Kebencanaan dan Pemasangan Rambu Jaur Evakuasi	Jumlah Siswa yang Terlatih								1 Tahun	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000
				Pembuatan Data Base dan Peta Digital Bencana	Jumlah Data Base dan Peta Digital Bencana yang Tersedia								1 Database	100.000.000	1 Database	0	1 Database	100.000.000
				Sosialisasi Kebencanaan	Jumlah Masyarakat yang Mendapat Edukasi Kebencanaan								20 Desa	100.000.000	20 Desa	0	20 Desa	100.000.000
				Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Peningkatan Persentase Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Bencana Alam								1 Tahun	100.000.000	12 Bulan	0	12 Bulan	100.000.000
8.	Memelihara Fungsi Lingkungan Hidup	Memelihara kelestarian sumberdaya alam		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Peralatan dan Logistik Bencana yang Tersedia			30.000.000		90.000.000		79.400.000		175.000.000		190.000.000		190.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							2016		2017		2018		2019		2020			
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Pendampingan Bantuan Peralatan dan Logistik	Jumlah Bantuan Logistik dan Peralatan yang Diperoleh dari Pemerintah Provinsi dan Pusat	100 Orang	100 Orang	30.000.000	100%	90.000.000	1 Dokumen	79.400.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	110.000.000
				Penyusunan dan Inventarisasi Peralatan dan Logistik Bencana	Jumlah Peralatan Logistik bencana di setiap SKPD terkait								1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000
9.	Memelihara Fungsi Lingkungan Hidup	Memelihara kelestarian sumberdaya alam		Program Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Korban Darurat Bencana			320.000.000		220.000.000		229.400.000		420.000.000		665.000.000		665.000.000
				Penyediaan Dana Siap Pakai Bagi Korban bencana	Jumlah Pemberian Bantuan Stimulasi Bagi Korban Bencana	200 Orang	200 Orang	200.000.000	200 Orang	100.000.000	40 KK	129.000.000	50 KK	250.000.000	60 KK	300.000.000	60 KK	300.000.000
				Pengkajian dan Pendataan Peristiwa Bencana	Jumlah Pengkajian dan Pendataan Bencana yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	165.000.000
				Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat yang Terlatih	1 Tim	1 Tim	80.000.000	29 Orang	80.000.000	24 Orang	60.400.000	25 Orang	100.000.000	30 Orang	200.000.000	30 Orang	200.000.000
10	Memelihara Fungsi Lingkungan Hidup	Memelihara kelestarian sumberdaya alam		Program Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Kejadian Bencana yang Difasilitasi			6.739.393.300		749.985.000		15.688.600.000		38.150.000.000		38.238.500.000		38.238.500.000
				Peningjaan dan Assesment Kerusakan dan Kerugian Masyarakat Pasca Bencana	Jumlah Kegiatan Assesment yang Difasilitasi	1 Paket	1 Paket	75.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Dokumen	142.800.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							2016		2017		2018		2019		2020			
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana	Jumlah Rumah Masyarakat Pasca Bencana yang Diperbaiki						100 KK	295.800.000	200 KK	500.000.000	200 KK	500.000.000	200 KK	500.000.000
				Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Pasca Bencana	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pasca Bencana						10 Kali	75.000.000	10 Kali	75.000.000	10 Kali	82.500.000	10 Kali	82.500.000
				Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan Jenis Material Dasar yang Difasilitasi	200 Rumah	200 Rumah	245.000.000	100 Rumah	225.000.000	2805 Meter	15.000.000.000		1.000.000.000	2.000 Meter	1.000.000.000	2.000 Meter	1.000.000.000
				Pendampingan Pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah	Pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah dapat terdampingi	1000 Meter	1000 Meter	50.000.000			1 Dokumen	175.000.000						
				Pembangunan Tanggul/Bronjong	Persentase Jumlah Tanggul yang Difasilitasi	100 Meter	100 Meter	200.000.000	200 Meter	440.000.000			3000 Meter	1.500.000.000	3000 Meter	1.500.000.000	3000 Meter	1.500.000.000
				Pembangunan Tanggul/Bronjong (lanjutan)	Persentase Jumlah Tanggul yang Difasilitasi	1000	1000	111.142.000	68 Meter	9.985.000								
				Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Lanjutan)	Cakupan Jenis Material Dasar yang Difasilitasi	1000 Meter	1000 Meter	6.058.251.300										
				Rehabilitasi dan Rekonstruksi Break Water	Jumlah Break Water yang direhabilitasi								2 Unit	1.500.000.000	2 Unit	1.500.000.000	2 Unit	1.500.000.000
				Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai	Jumlah Tanggul Pengaman Pantai yang dibangun								16 Unit	21.550.000.000	16 Unit	21.550.000.000	16 Unit	21.550.000.000
				Pembangunan Tanggul Pengaman Sungai	Jumlah Tanggul Pengaman Sungai yang dibangun								3 Unit	5.700.000.000	3 Unit	5.700.000.000	3 Unit	5.700.000.000
				Studi Banding Kebencanaan	Tersedianya Informasi Kebencanaan dan Bahan Perbandingan dalam Penanganan Bencana pada Tahap Pasca Bencana								1 Tahun	250.000.000		250.000.000		250.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							2016		2017		2018		2019		2020			
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Perbaikan lingkungan Wilayah Pasca Bencana	Terpenuhinya Perbaikan Lingkungan Wilayah Pasca Bencana								1 Tahun	5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000
				Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum Pasca Bencana	Terpenuhinya Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum Masyarakat pada Pasca Bencana								1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada Wilayah Pasca Bencana	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana								12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	99.000.000	12 Bulan	99.000.000
				Dana Pendampingan Wilayah Pasca Bencana	Terpenuhinya Pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah Pasca Bencana								12. Bulan	525.000.000	12. Bulan	577.000.000	12. Bulan	577.000.000
JUMLAH								9.840.548.300		3.449.985.000		17.896.150.000		70.233.883.180		74.534.966.684		74.534.966.684

Benteng, Juli 2018  
**KEPALA PELAKSANA BPBD,**

**dr. Hj. SARIBULAN ARIFIN**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19590818 198803 2 007